

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan

Oeky Diasworo¹, Nurfuadi²

Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
oekydiasworo08@gmail.com, nurfuadi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

A responsive approach to gender issues in developing the Islamic religious education curriculum is becoming increasingly important because it supports efforts to achieve equality and justice in education. The aim of this study is to explore the urgency and implications of developing a gender-responsive curriculum in the context of Islamic religious education. Through in-depth analysis, this journal examines the concept of gender equality in Islamic education, identifies the challenges faced in integrating gender perspectives in the curriculum, and offers practical strategies to achieve this goal. A gender-responsive Islamic religious education curriculum must also pay attention to several things, namely: 1). Gender context: curriculum development must understand gender roles in society and recognize differences and equality between men and women. 2). Moral values: every lesson in the curriculum must include moral values that are relevant to religion, because they will help students understand not only the transfer of knowledge, but also character formation skills. 3). Competency-based curriculum: the use of a competency-based curriculum allows for a more holistic approach. Students not only gain knowledge, but also relevant skills and values. With this approach, it is hoped that the Islamic religious education curriculum can provide a more meaningful learning experience and support equality and justice in education.

Keywords: curriculum, Islamic religious education, gender

ABSTRAK

Pendekatan yang responsif mengenai isu gender dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menjadi semakin penting karena untuk mendukung upaya di dalam mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi urgensi dan implikasi dari pengembang kurikulum yang responsif gender dalam konteks pendidikan agama Islam. Melalui analisis yang mendalam, jurnal ini mengamati mengenai konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum, dan menawarkan strategi praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum pendidikan agama Islam yang responsif gender harus juga memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1). Konteks gender: pengembangan kurikulum harus memahami peran gender dalam masyarakat dan mengakui perbedaan serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; 2). Nilai-nilai moral: setiap pelajaran dalam kurikulum harus mencakup nilai-nilai moral yang relevan dengan agama, karena akan membantu peserta didik di dalam memahami bukan hanya dengan transfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga pada keterampilan pembentukan karakter; 3). Kurikulum berbasis kompetensi: penggunaan kurikulum berbasis kompetensi memungkinkan pendekatan yang lebih holistik. Peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, akan tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai yang relevan. Dengan pendekatan ini diharapkan kurikulum pendidikan agama Islam dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih berarti dan mendukung kesetaraan serta keadilan dalam pendidikan.

Kata kunci: kurikulum, pendidikan agama Islam, gender

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk mendidik dan membantu dalam membentuk akhlak dan kepribadian (Zainuddin, 2021). Pendidikan bukan sekedar proses belajar tetapi merupakan salah satu sumber segala ilmu (Setyowati, 2019). Pendidikan adalah sarana paling strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan tanggung jawab umat Islam baik laki-laki maupun perempuan (Zainuddin, 2021). Pendidikan merupakan aset sebuah bangsa, pendidikan juga menjadi ciri khasnya pengembang karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan segera diberikan lahirnya kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk maka akan berdampak buruk mempunyai implikasi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan dan ketersediaannya partisipasi masyarakat yang cerdas (Marwing, 2021).

Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara. Prinsip Islam adalah sesuai dengan kodrat laki-laki dan perempuan di dalam berpikirnya. Islam mempunyai masyarakat yang terkena dampak baik laki-laki maupun perempuan dengan hubungan dan hak, serta kewajiban yang terkait dengan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama, apa yang Islam buktikan selalu tidak diwujudkan dalam tindakannya karena etnis yang berlaku standar dan juga dalam konteks sosial dan budayanya (Nawazt et al, 2021).

Pendidikan agama Islam dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan ini melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, dan pengajaran yang sudah ditentukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk memahami, mengenal, dan menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, idealnya Pendidikan agama Islam yang mendasari pendidikan-pendidikan lain, serta menjadi primadona bagi masyarakat, orang tua dan peserta didik. Pendidikan agama Islam seharusnya juga mendapat waktu yang proporsional, tidak hanya di madrasah atau sekolah yang bernuansa Islam, akan tetapi juga di sekolah umum. Dengan demikian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan agama Islam perlu dijadikan tolak ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik serta membangun moral bangsa (*national charter building*).

Walaupun demikian sangat disayangkan di Indonesia masih ditemui stigma pada paradigma di masyarakat yang cenderung masih rasis terhadap kaum perempuan, hal ini karena bukan hanya datang dari golongan patriarki akan tetapi juga dari kaum perempuan sendiri, bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi, karena fitrah perempuan itu di rumah dan mengurus rumah

tangga. Sehingga aktivitas mereka di dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektualisasi dibatasi. Sedangkan laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, terkecuali tidak bagi perempuan. Inferioritas dan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan di akhirnya menghalangi mereka untuk menduduki posisi kekuasaan publik. Peran-peran publik perempuan dianggap menyalahi kodrat dan dengan begitu menentang kehendak Tuhan.

Diperoleh data dari ikhtisar data pendidikan dasar dan menengah tahun 2017-2018 oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sekretariat jenderal pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan bahwa jumlah siswa menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan tiap pendidikan lebih banyak laki-laki, yaitu: jumlah siswa laki-laki di SLB 80.690 dan perempuan 53.136, jumlah siswa laki-laki di SD 13.154.154 dan perempuan 12.084.075, jumlah siswa laki-laki di SMP 5.101.174 dan perempuan 4.880.042.

Menurut Siti Khoirun Ni'mah mengatakan fakta dan data yang menunjukkan perempuan masih tertinggal dalam pembangunan. Sebanyak 60% angkatan kerja hanya 49%, di bawah rata-rata partisipasi kerja penduduk Indonesia yang mencapai 65,4%. Rata-rata lama pendidikan perempuan adalah 8,1 tahun di bawah rata-rata pendidikan nasional 8,4 tahun. Persentase perempuan buta huruf masih sebanyak 4,39%, lebih tinggi dari laki-laki 2,92%. Laporan World Economic forum menunjukkan posisi Indonesia berada pada urutan ke-88 pada indeks kesenjangan gender pada 2016. Indeks kesetaraan kita jauh di belakang negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Laos, dan Thailand. Berbagai studi juga menunjukkan ketimpangan gender memperlambat ekonomi dan menjadi penghambat pengentasan bagi orang miskin.

Ketimpangan dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketimpangan pada akses terhadap pendidikan dan ketimpangan pada hasil pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan dapat berdampak pada feminisasi dalam pendidikan. Ketidaksamaan kesempatan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan hanya bisa diterima pada sistem pendidikan tertentu. Dalam masyarakat yang sudah berkembang bahwa sikap perempuan hanya cocok pada jenis pendidikan tertentu dan tidak pantas memilih sistem pendidikan lainnya. Hal ini menyebabkan dampak, yang di mana lagi-lagi perempuan menjadi korban khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan ditambah pula dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah.

Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk pemikiran dan perilaku individu Muslim, namun di dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, perlu adanya pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan, pendidikan Islam responsif gender saat ini menjadi sebuah kebutuhan, terutama untuk kalangan orang tua yang meyakini bahwa dengan menanamkan nilai-nilai adil gender pada pendidikan anak maka akan dapat menghasilkan generasi yang berperspektif gender dalam memperlakukan anaknya nanti sehingga bisa terwujud masyarakat yang

berwawasan gender, yang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil, harmonis, dan setara.

Pada dasarnya pada pendidikan Islam responsif gender adalah cara untuk mendidik anak laki-laki maupun perempuan secara adil tanpa membedakannya dan tidak menganggap bahwa laki-laki yang lebih unggul. Sebagaimana dalam ajaran agama Islam yang tidak membedakan jenis kelamin tertentu atas yang lain terkecuali karena ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan materi dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang responsif gender. Adapun metode (analisis data) yang digunakan yaitu metode deduksi, induksi, komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan orang dewasa terhadap orang yang dianggap belum dewasa. Pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tujuan tertentu dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk membentuk perkembangan anak menuju kedewasaan. Menurut para ahli, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dan penyusunan diri individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita sosial. Oleh, karena itu berbagai aspek kehidupan untuk mereka agar siap mengatasi semua tantangan. Pendidikan Islam yaitu petunjuk yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang sedang tumbuh untuk membentuk kepribadian muslim. Dalam hal ini, Zakiyah Drajat menjelaskan orang tua adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Pendidikan Islam pada khususnya membentuk sikap hidup yang dijiwai dengan nilai-nilai agama Islam dan juga mengembangkan keterampilan pengetahuan dengan nilai keislaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam yaitu suatu proses pembelajaran yang berpusat mengenai nilai-nilai agama, hukum-hukum Islam, akhlak, moral, adab, dan akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya yaitu agar membentuk individu yang beriman, memiliki akhlak yang mulia, berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar, membangun potensi manusia menuju kemajuan di dalam segala aspek kehidupannya, mengajarkan nilai-nilai moral, etika dan juga keberagaman di dalam Islam. Ruang lingkungannya yaitu materi pembelajarannya mencakup: Al-Qur'an dan hadist, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah Islam. Pendidikan agama Islam berfokus kepada pelatihan keterampilan, sosial, pengembangan berpikir kritis, dan kepemimpinan.

Responsif Gender dalam Pendidikan

Di dunia pendidikan formal bias gender bisa dilihat dari perumusan kurikulumnya. Implementasi kurikulum sendiri tertuang dalam buku teks yang digunakan di sekolah. Realita yang ada pada saat ini, kurikulum masih banyak yang menekankan pada laki-laki yang bekerja di sektor publik dan perempuan yang bekerja di sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat materi untuk siswa, belum mencantumkan perspektif gender dalam setiap gambar atau ilustrasi teks yang digunakan untuk menjelaskan materi tersebut. Kenyataan ini jelas menimbulkan gambaran bahwa perempuan lebih lemah secara fisik dan mental dibandingkan laki-laki. Dengan begitu, gambaran perempuan dalam berbagai aspek negatifnya telah mengakar kuat di dalam sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri, yang berakibat, data menunjukkan bahwa dunia pendidikan terdapat ketimpangan kesempatan pendidikan bagi perempuan masih dibawah kaum laki-laki. Konsep responsif gender dalam pendidikan mengacu pada pendekatan yang memperhatikan peran gender dan memastikan kesetaraan serta keadilan bagi semua individu, dan tidak memandang jenis kelamin, berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep responsif gender:

- a. Kesetaraan gender tidak hanya akses semata: kesetaraan gender di dalam pendidikan bukan hanya tentang memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender melibatkan perlakuan yang setara dan adil dalam proses pembelajaran dan hasil-hasilnya, dan responsif gender mengakui perbedaan dan memastikan bahwa pendidikan menghargai kebutuhan dan potensi semua individu, tanpa memandang gender.
- b. Pendekatan pembelajaran yang responsif gender: di dalam kelas, murid laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengalaman yang berbeda hal ini dapat mempengaruhi partisipasi di kelas dan pencapaian hasil belajarnya, serta guru harus memastikan lingkungan pembelajaran yang tanggap gender.
- c. Implementasi responsif gender: materi pembelajaran harus memperhatikan perspektif gender, guru harus memperlakukan semua murid dengan adil dan memberikan perhatian yang setara terhadap kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan, lingkungan belajar harus menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi semua.
- d. Dampak responsif gender: implementasi responsif gender dapat meningkatkan partisipasi, kesejahteraan peserta didik, dan pencapaian, serta dapat berkontribusi pada kesetaraan dalam pendidikan dan masyarakat secara lebih luas.

Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan

Kesetaraan dan keadilan di dalam pendidikan adalah dua konsep yang saling berkaitan satu sama lain karena memiliki peran sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, tanpa memandang asal usul, jenis kelamin, agama, atau kondisi fisik. Di dalam konteks pendidikan, kesetaraan berarti memastikan bahwa semua siswa mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan

berkualitas. Sedangkan keadilan yaitu upaya untuk mencakup penghapusan hambatan seperti diskriminasi, akses dan hasil pendidikan yang tidak setara.

Keadilan pendidikan dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti tingkat partisipasi, akses terhadap lembaga pendidikan, dan pemerataan sumber daya. Keadilan pendidikan juga berfokus pada menjamin hak dan perlakuan kebutuhan serta potensinya yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan kesetaraan dalam pendidikan berarti untuk memastikan bahwa semua siswa menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan yang adil mengakui perbedaan individu dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Kesetaraan juga berarti mengalokasikan sumber daya secara bijaksana dan memastikan bahwa semua siswa mempunyai kesempatan yang setara untuk berkembang.

Kesetaraan gender dalam kurikulum

Kurikulum ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil serta memasuki sekolah yang lebih tinggi, akan tetapi pada bias gender dalam kurikulum dan materi pengajaran dan pembelajaran yang masih banyak terjadi di negara-negara berkembang dan berpendapat menengah. Melalui teks atau gambar spesifik gender semakin memperkuat stereotip gender. Hasil analisis gender yang dilakukan pada tahun 2011 mengungkapkan adanya bias gender yang signifikan dalam buku teks Bahasa Indonesia. Sebagai ilustrasi penulis menggunakan sekelompok anak yang terdiri dari tiga perempuan dan satu laki-laki, salah satu siswa digambarkan sebagai seseorang yang sering bertanya dan berulang kali melakukan kesalahan, misalnya memegang tidak mematikan air setelah menggunakannya. Siswa lainnya digambarkan sebagai seseorang yang selalu bertanya mengenai berbagai hal dan sebaliknya siswa laki-laki digambarkan sebagai siswa yang cerdas dan selalu mengetahui jawaban yang benar dan juga menjelaskannya kepada teman sekelasnya. Di dalam praktik yang baik untuk mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan materi. Hal ini mencakup revisi secara berkala terhadap materi-materi tersebut untuk memasukkan pendekatan yang sensitif gender dan perspektif gender, yang di mana upaya tersebut dilakukan untuk pembentukan dalam lembaga formal yang bertugas untuk menghilangkan stereotip gender dalam buku pelajaran materi lainnya.

Menuju Kesetaraan Gender dan Keadilan dalam Pendidikan

Dalam berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi pada kehidupan masyarakat juga terjadi di dunia pendidikan. Padahal, pada lembaga pendidikan dinilai berperan penting dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai kesenjangan gender di masyarakat. Secara umum fenomena perbedaan gender dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, yang pertama yaitu, kurangnya partisipasi, karena dalam hal ini sebagian besar perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki, partisipasi perempuan di dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Jumlah siswa perempuan biasanya hanya

sepertiga dari jumlah siswa laki-laki. Yang kedua, yaitu kurangnya keterwakilan perempuan sebagai guru atau kepala lembaga pendidikan formal yang menunjukkan adanya kecenderungan dominasi laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan. Yang ketiga perlakuan tidak adil, yaitu suatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas sering kali bersifat merugikan murid perempuan.

Guru dengan secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Para guru terkadang masih menganggap bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan bagi perempuan. Pada persoalan kesenjangan gender dalam pendidikan erat kaitannya dengan diskriminasi. Ada dua jenis diskriminasi yaitu, diskriminasi menurut undang-undang dan diskriminasi *de jure*. Diskriminasi hukum yaitu diskriminasi peraturan, ketentuan ini memberikan pembedaan yang utuh antara laki-laki dan perempuan, faktanya tidak ada hukum dalam dunia pendidikan yang membedakan keduanya. Padahal keduanya mempunyai hak yang sama atas pendidikan, dengan demikian menurut undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada diskriminasi, akan tetapi kenyataannya masih terdapat persepsi yang berbeda dan yang membedakannya antara laki-laki dan perempuan, bahkan muncul pandangan bahwa perempuan adalah warga negara kelas kedua dan inferior dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai hak yang sama atas pendidikan seperti laki-laki.

Bahkan di dalam konteks pendidikan tinggi antara, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan masih terlihat, misalnya dalam memilih jurusan yang ada dan dianggap umum bahwa perempuan lebih baik mengambil jurusan sastra dan laki-laki lebih baik mengambil jurusan tekni. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang menganggap laki-laki adalah pencari nafkah utama. Oleh, karena itu pendidikan mereka lebih diprioritaskan, pandangan seperti ini yang menyebabkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Namun situasi ini juga berarti bahwa tingkat putus sekolah anak perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, terutama di komunitas perempuan di daerah pedalaman dan pedesaan. Jika kesenjangan gender dalam pendidikan tidak segera diatasi, perempuan akan selamanya terpinggirkan di bidang pendidikan. Dengan demikian, kesetaraan gender di dalam dunia pendidikan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki untuk memajukan dunia pendidikan. Untuk mencapai kesetaraan gender pendidikan harus memenuhi asas yaitu, penyelenggaraan pendidikan kepada seluruh individu atau masyarakat sehingga dapat disebut pendidikan berbasis gender.

Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan yaitu: 1). perlakuan yang sama dan kesempatan pendidikan yang setara bagi setiap gender serta tingkat situasi ekonomi, sosial, politik, agama dan geografis penduduk, di dalam konteks ini juga sistem pendidikan yang tidak boleh memberikan tebang pilih terhadap kondisi masyarakat, terutama dari jenis manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan; 2). Pendidikan tidak berdasarkan dari bias gender. Dalam dunia pendidikan, sistem pendidikan dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus mengakui bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak atas pendidikannya. Dengan cara ini, bias gender dapat diminimalkan; 3). Menyediakan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing individu. Para pengambil

kebijakan di dunia pendidikan perlu menyadari bahwa setiap individu mempunyai minat dan bakat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Mengingat beragamnya minat dan bakat tersebut, maka setiap pendidik harus menyediakan model dan konten pembelajaran yang menjawab minat dan bakat setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan; 4). Pendidikan harus tanggap terhadap tuntutan zaman. Dalam konteks ini, pelatihan siswa yang harus selaras dengan kebutuhan masa depan, tujuannya yaitu agar peserta didik di masa depan bisa teraktualisasikan dan juga bisa menyesuaikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, di masa yang akan datang keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman.

Pengembangan model integrasi kurikulum kesetaraan gender yang dikembangkan oleh pusat penelitian kurikulum dan kementerian pendidikan nasional merupakan bagian dari pengembangan kurikulum inovatif, model kurikulum terpadu kesetaraan gender dalam kehidupan. Upaya yang dilakukan ditunjukkan kesetaraan dan keadilan gender. Pemahaman mengenai kesetaraan gender ini tertanam dalam berbagai peraturan nasional, yang di mana didasarkan pada instrumen internasional, seperti yang tercantum di bawah ini:

- 1) Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia Yang Kemudian Indonesia Telah Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Yang Telah Diratifikasi Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 3) Konvensi Anak Yang Telah Diratifikasi Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Kesetaraan gender yang terkandung dalam peraturan ini harus dipahami oleh siswa sebagai bagian dari kurikulum dan dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran secara mandiri atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, tentu saja pada setiap masing-masing memiliki dampak yang berbeda, melihat padatnya mata pelajaran yang diberikan kepada para siswa SLTP dan SLTA, maka sudah terdapat banyak mata pelajaran sehingga konsep kesetaraan gender perlu diintegrasikan karena berbagai alasan seperti: model yang dikembangkan terintegrasi antar mata pelajaran, tidak mengubah struktur kurikulum yang ada, tidak menambah alokasi waktu yang tersedia, materi yang dikembangkan spesifik konteks, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender atau kegiatan pembelajarannya.

Sedangkan pada nilai-nilai kesetaraan gender yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum, yaitu: *persamaan hak laki-laki dan perempuan, perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, partisipasi laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan, kerja sama laki-laki dan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, menghargai kemajemukan, dan demokrasi*. Nilai-nilai kesetaraan gender tersebut dapat diintegrasikan dalam kurikulum serta dapat disebarluaskan pada mata

pelajaran PAI, berikut ini langkah-langkah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu: *Pertama*, merumuskan visi, misi, tujuan sekolah, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum berbasis gender. *Kedua*, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi yang dapat diintegrasikan oleh nilai-nilai kesetaraan gender dalam mata pelajaran PAI. *Ketiga* mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam indikator atau kegiatan pembelajaran silabus dan rencana pembelajaran.

KESIMPULAN

Menuju kesetaraan gender dan keadilan dalam pendidikan bukanlah untuk mempertentangkan dua jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih untuk menciptakan hubungan yang setara dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena, itu pendidikan yang berorientasi gender merupakan sebuah keputusan strategis. Langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah pengembangan kebijakan responsif gender dalam pendidikan nasional. Model kurikulum terpadu kesetaraan gender yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan yaitu prinsip, karena diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa mengenai pentingnya kesetaraan gender dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Marwing, A. dan Y. (2021). *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*. Bintang Pustaka Madani.
- Nawaz, S., Shabbir, M. S., Shaheen, K., & Koser, M. (2021). *The Role of Human Rights and Obligations toward Cross Gender Empowerment under the domain of Islamic Laws*. IRASD Journal of Management, 3(3), 208-217.
- Routledge. Students, S. (2023). *Effect of Scaffolding Instructional Strategy and Gender on Academic Achievement of Senior Secondary School Islamic*. 3(1), 139-144.
- Savitri, Niken. (2015). "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan", dalam Buletin Sancaya, Vol. 3, No, 2, Maret-April, 2015.
- Setiawan, Hesri, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999).
- Setyowati, N. (2019). *Pendidikan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo*. Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme, 01, 35-47.
- Sirri, L. (2021). *Islamic feminism: Discourses on gender and sexuality in contemporary Islam*. In Routledge critical studies in religion, gender and sexuality.
- Suhra, Sarifa. (2013). "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", dalam Jurnal al-Ulum, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

Jurnal Dirosah Islamiyah

Volume 6 Nomor 3 (2024) 602 - 611 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683
DOI: 10.17467/jdi.v6i3.2397

Supriyadi, T., Julia, J., & Firdaus, E. (2019). *The problems of gender equality: A reconstruction of Islamic doctrine*. Journal of Social Studies Education Research, 10(2), 91–110.

Susilaningsih dan Agus M. Najib (ed). *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan McGill ISEP, 2004.

Zainuddin, A. (2021). *Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka*. Al Amin, 4, 115–135